

**Judul** : KLHK Verifikasi Sawit Ilegal  
**Tanggal** : Selasa, 29 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

# KLHK Verifikasi Sawit Ilegal

*Verifikasi keberadaan perkebunan sawit ilegal dilakukan melalui dua cara, yaitu verifikasi fisik dan subjek.*

**ATALYA PUSPA**  
[atalya@mediaindonesia.com](mailto:atalya@mediaindonesia.com)

**K**EMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta persetujuan kepada DPR RI untuk melakukan pendataan yang lebih mendalam tentang luasan perkebunan sawit ilegal yang ada di Indonesia. Menteri LHK Siti Nurbaya berencana, mulanya pendataan dan verifikasi data lapangan akan dilakukan di wilayah Riau.

"Kita boleh buat metodenya yang pas dari citra satelit, kemudian kita harus membuat satgas yang banyak dan bisa disupervisi," ujar Siti dalam rapat kerja bersama dengan

Komisi IV DPR RI, kemarin.

"Saya minta waktu dan mohon persetujuan KLHK akan buat tim. Kalau boleh, nanti kita disupervisi dan *trial* di Riau karena Riau paling banyak," imbuh Siti.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau, terdapat 1,8 juta hektare perkebunan sawit ilegal. Namun, diakui Siti, pendataan secara mendalam memang sulit dilakukan.

Saat ini, Siti mengungkapkan KLHK telah melakukan pendataan melalui citra satelit. Meskipun pendataan dengan metode itu diragukan banyak pihak, Siti menegaskan upayanya tidak asal-asalan.

"Itu bukan asal-asalan, tapi normal seperti itu. Jalan keluarnya

adalah tadi sudah diberi arahan. Kita harus melakukan inventori yang sangat dalam. Karena pada dasarnya verifikasi memang ada dua hal, yaitu verifikasi fisik dan subjek. Jadi, itu yang harus dilakukan ke depan," beber dia.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengungkapkan berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukannya, masalah perkebunan sawit ilegal di area hutan masih sangat kompleks dan belum bisa diselesaikan. Ia meminta agar KLHK berani secara tegas melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran sertifikat di area kebun sawit ke Mabes Polri karena hal itu jelas melanggar undang-undang yang berlaku.

## Hutan alam

Pada kesempatan yang sama, Siti Nurbaya menegaskan tidak ada spesies orang utan yang tinggal di

wilayah ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan survei langsung ke lapangan. "Di wilayah ini tidak ada orang utannya. Yang ada di bagian selatannya," kata Siti.

"Tapi ada catatan berbagai satwa, flora, dan fauna di situ. Ada datanya. Maka perlu dilakukan koridor satwa. Dari hutan ke hutan satwanya tidak terganggu melewati. Di utara dan selatan. Ini sudah diidentifikasi dengan baik dan sekarang kita kerjakan," beber Siti.

Di tempat terpisah, Ketua Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (Foretika) Naresworo Nugroho menyoroti rencana pembangunan hutan alam tropika buatan yang akan diusung pemerintah di IKN.

"Intervensi manajemen manusia menjadi keniscayaan untuk mewujudkan hutan alam tropika buatan tersebut. Perlu perencanaan yang matang, mulai *baseline*, rencana desain tapak lanskap, dan penahapan kegiatan," kata Naresworo saat dihubungi, kemarin.

Naresworo menyarankan pemilihan jenis untuk pengayaan dapat dikombinasikan antara jenis *native* Kalimantan yang umumnya *slow growing* dan jenis-jenis *fast growing* untuk mempercepat penutupan vegetasi. (H-3)